



Manajemen Stakeholder dalam Pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya

Iis Ariska¹, Catherine Felisha Pramadita², Nandea Khodijah³, Vini Anggun Pratiwi⁴, Yista⁵, Yogi Alja'is Fadillah⁶, Rudy Kurniawan⁷, Kurnia Asni Sari⁸, Ilal Ilham⁹

Jurusan Sosisologi, Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: lis20211234@gmail.com, catherinefelisha03@gmail.com, nandeakhodijah@gmail.com, yistayista8@gmail.com, yogialjais@gmail.com, rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id, sarikurniaasni@gmail.com, ilalilham@fisip.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The development of villagebased tourism has become an important strategy in improving local economic conditions and encouraging community participation in tourism management. One of the potential to be developed is the Blue Lake Tourism Village located in Palem Raya. The success of managing a tourism village is closely related to the involvement of various stakeholders who play different roles in supporting tourism activities. This study aims to analyze stakeholder management in the management of the Blue Lake Tourism Village in Palem Raya. The research uses a qualitative descriptive approach to understand the roles and relationships among stakeholder involved in the tourism village management. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving several stakeholders, including the village government, tourism managers, local communities, local business actors, and tourism, as well as supporting stakeholders such as regional governments and investors. The results of the Blue Lake Tourism Village has generally been implemented through coordination and collaboration among various parties. The village government plays a role in policy support and coordination, tourism managers are responsible for operational management, while local communities and business actors contribute to economic activities and services for tourists. However, several challenges remain, including limited infrastructure, funding constraints, and suboptimal tourism promotion. Strengthening cooperation among stakeholders and improving management strategies are necessary to support sustainable tourism development in the Blue Lake Tourism Village.

Keywords: collaboration, stakeholder management, tourism village, tourism development, village tourism

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Desa Wisata Danau Biru yang terletak di Palem Raya. Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda dalam mendukung aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami peran dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan, serta stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru telah berjalan melalui koordinasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam dukungan kebijakan dan koordinasi, pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha lokal berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendanaan, serta promosi wisata yang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar stakeholder untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Kolaborasi, Manajemen Stakeholder, Pariwisata Desa, Pengembangan Pariwisata.*

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah konsep desa wisata, yaitu model pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam, budaya, serta kehidupan masyarakat desa sebagai daya tarik wisata. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan destinasi tersebut, yang dalam kajian pariwisata dikenal sebagai stakeholder. (Muntiyas et al., 2024)

Stakeholder dalam sektor pariwisata mencakup berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, investor, serta wisatawan yang memiliki peran berbeda dalam proses pengembangan destinasi wisata. Keterlibatan berbagai stakeholder tersebut sangat penting karena pengelolaan destinasi wisata pada dasarnya merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya yang saling berkaitan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat bergantung pada kemampuan dalam membangun koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang terlibat. Tanpa adanya kerja sama yang baik, pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya wisata. (Purboyo et al., 2020)

Dalam konteks pengembangan desa wisata, keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan destinasi wisata.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di daerahnya. Penelitian mengenai pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal. (Iswanto & Puspitasari, 2024)

Salah satu potensi wisata yang berkembang di tingkat lokal adalah Desa Wisata Danau Biru di Palem Raya, yang memiliki potensi alam yang menarik serta berpeluang menjadi destinasi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengelolaan desa wisata ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda dalam mendukung pengembangan kawasan wisata. Stakeholder utama yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru antara lain Pemerintah Desa Palem Raya, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan. Selain itu, terdapat pula stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor yang berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta investasi dalam pengembangan destinasi wisata.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran stakeholder dalam pengembangan destinasi wisata, baik pada kawasan wisata alam maupun desa wisata. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pengembangan destinasi atau dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Pakseballi di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa setiap stakeholder memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, sehingga kerja sama yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. (Semara, 2024)

Penelitian lain berjudul Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Buku menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat kolaborasi antar stakeholder yang terlibat. Penelitian tersebut menemukan bahwa kurangnya koordinasi dan kerja sama antar stakeholder dapat menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain perlu dikelola secara lebih efektif agar pengelolaan desa wisata dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian oleh Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Belumbang, Bali menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder mampu meningkatkan pengelolaan potensi wisata serta mendukung keberlanjutan pariwisata di tingkat desa.

Penelitian lain berjudul Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pantai Pulau Merah Banyuwangi sebagai Destinasi Wisata Bahari menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut berperan penting dalam pengembangan fasilitas wisata, peningkatan ekonomi masyarakat, serta promosi destinasi wisata.

Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas mengenai manajemen stakeholder dalam pengelolaan desa wisata pada tingkat lokal masih relatif terbatas, terutama dalam melihat bagaimana hubungan, peran, serta koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap peran, hubungan, serta keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana interaksi antar stakeholder berlangsung dalam proses pengelolaan destinasi wisata. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wisata Danau Biru yang berada di Palem Raya, yang merupakan salah satu kawasan wisata alam yang berkembang dan melibatkan partisipasi masyarakat serta berbagai pihak dalam pengelolaannya. (Made Ersani et al., 2025) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata Danau Biru. Informan penelitian meliputi pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan desa wisata, yaitu Pemerintah Desa Palem Raya, pengelola Desa Wisata Danau Biru, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan wisata, pelaku usaha lokal yang menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan wisata, serta wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peran stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor yang memberikan kontribusi dalam pengembangan fasilitas maupun dukungan kebijakan terhadap pengelolaan desa wisata. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen terkait pengelolaan desa wisata, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian. (Made Ersani et al., 2025) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kawasan wisata serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata Danau Biru. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai peran dan keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan desa wisata. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan

berbagai dokumen, foto, maupun catatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Danau Biru.(Anwar Thalib et al., 2022) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan kategori stakeholder yang terlibat, kemudian dianalisis untuk melihat peran, hubungan, serta bentuk kerja sama yang terjadi dalam pengelolaan desa wisata. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.(Syaeful Millah et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Danau Biru Palem Raya merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berkembang di tingkat lokal dan memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan kawasan wisata ini menjadi salah satu upaya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Danau Biru dikenal sebagai kawasan wisata yang menawarkan pemandangan alam yang menarik dengan karakteristik air danau yang memiliki warna kebiruan serta lingkungan yang masih relatif alami. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan asri. Selain itu, keberadaan danau ini juga menjadi salah satu alternatif destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan rekreasi di ruang terbuka.

Secara geografis, kawasan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya berada di lingkungan pedesaan yang masih memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik. Lingkungan sekitar kawasan wisata didominasi oleh vegetasi alami serta area terbuka yang memberikan suasana yang nyaman bagi para pengunjung. Keindahan panorama alam yang dimiliki oleh danau tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya aktivitas wisata di kawasan ini. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi lokasi tersebut, kawasan Danau Biru kemudian mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata yang dikelola secara bersama oleh pemerintah desa, pengelola wisata, serta masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Pengembangan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya tidak hanya berfokus pada pemanfaatan potensi alam yang dimiliki, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas wisata, baik melalui penyediaan berbagai layanan bagi pengunjung maupun melalui keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan kawasan wisata. Beberapa masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas pariwisata dengan membuka usaha kecil seperti warung makan, penjualan

minuman, maupun penyediaan jasa parkir bagi wisatawan yang berkunjung. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Selain partisipasi masyarakat, pengelolaan kawasan wisata ini juga didukung oleh peran pemerintah desa yang berfungsi dalam mengatur serta mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata. Pemerintah desa berperan dalam memberikan dukungan kebijakan serta memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata. Di sisi lain, pengelola wisata bertanggung jawab dalam mengatur operasional kegiatan wisata di lapangan, termasuk menjaga kebersihan kawasan, mengatur fasilitas yang tersedia, serta memastikan kenyamanan pengunjung selama berada di lokasi wisata.

Dalam perkembangannya, Desa Wisata Danau Biru Palem Raya juga mulai dikenal oleh masyarakat di luar wilayah sekitar sebagai salah satu lokasi wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan ini tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari wilayah lain yang tertarik untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Danau Biru. Aktivitas wisata yang berkembang di kawasan ini umumnya berupa kegiatan rekreasi, menikmati pemandangan alam, serta berbagai aktivitas santai yang dilakukan oleh pengunjung di sekitar area danau.

Meskipun demikian, pengembangan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata agar dapat berkembang secara lebih optimal. Beberapa aspek seperti peningkatan fasilitas pendukung, pengembangan infrastruktur, serta penguatan promosi wisata masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan destinasi wisata ini. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terencana serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, Desa Wisata Danau Biru Palem Raya diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pengelolaan desa wisata pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan serta tanggung jawab dalam pengembangan destinasi tersebut. Dalam konteks Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, keberhasilan pengelolaan kawasan wisata sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi stakeholder yang terlibat, baik stakeholder utama maupun stakeholder pendukung. Setiap stakeholder memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta pihak lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, serta sektor swasta dalam mengelola potensi wisata secara bersama-sama. (Made Ersani et al., 2025)

Pemerintah Desa Palem Raya memiliki peran strategis dalam proses pengelolaan Desa Wisata Danau Biru. Pemerintah desa berfungsi sebagai pihak yang menyusun kebijakan, mengatur pengelolaan kawasan wisata, serta memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan desa wisata serta memastikan bahwa aktivitas pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. (Anwar et al., 2025)

Selain pemerintah desa, pengelola Desa Wisata Danau Biru memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional kegiatan wisata di lapangan. Pengelola wisata berperan dalam mengatur aktivitas wisata, menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa fasilitas yang tersedia dapat digunakan dengan baik oleh wisatawan. Pengelola juga bertugas dalam mengembangkan berbagai program atau kegiatan yang dapat meningkatkan daya tarik wisata, seperti penyediaan fasilitas rekreasi, pengelolaan area wisata, serta pengaturan pelayanan kepada pengunjung. Dengan adanya pengelolaan yang baik, keberadaan desa wisata diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang positif bagi para pengunjung. (Putri, 2023)

Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan wisata, seperti penyediaan jasa parkir, penjualan makanan dan minuman, serta pengelolaan fasilitas wisata sederhana. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga mendorong upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata tersebut. (Ramadina et al., 2023)

Pelaku usaha lokal juga turut memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas pariwisata di kawasan Desa Wisata Danau Biru. Keberadaan usaha kecil seperti warung makan, penyewaan perlengkapan wisata, serta penjualan produk lokal dapat memberikan tambahan layanan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata. (Tohir et al., 2023)

Wisatawan juga dapat dianggap sebagai salah satu stakeholder dalam pengelolaan desa wisata karena keberadaan mereka menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas pariwisata. Wisatawan tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan wisata, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap

perkembangan destinasi melalui pengalaman dan penilaian mereka terhadap kualitas layanan yang tersedia. Kepuasan wisatawan terhadap fasilitas, kebersihan lingkungan, serta pelayanan yang diberikan oleh pengelola dapat mempengaruhi minat kunjungan wisata di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan desa wisata perlu memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan wisatawan agar destinasi wisata dapat berkembang secara berkelanjutan.(Annisa Lazuardina, 2023)

Selain stakeholder utama, pengelolaan Desa Wisata Danau Biru juga mendapat dukungan dari stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, program pengembangan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata. Sementara itu, investor dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan atau pengembangan fasilitas wisata yang dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata. Dukungan dari berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata membutuhkan kerja sama yang melibatkan berbagai stakeholder agar potensi wisata yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.(Afifah Dina Fatmahan, 2024)

Pengelolaan desa wisata pada dasarnya memerlukan kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan kawasan wisata. Dalam konteks Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, pola kerja sama antar stakeholder menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Kerja sama tersebut tercermin melalui adanya koordinasi, kolaborasi, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pihak lain yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata. Melalui hubungan yang terjalin secara terorganisasi, setiap stakeholder dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga pengelolaan desa wisata dapat berlangsung secara efektif.(Suherlan et al., 2022)

Bentuk koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung serta kegiatan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah desa berperan sebagai pihak yang memfasilitasi proses koordinasi tersebut dengan mengadakan pertemuan atau diskusi bersama yang membahas berbagai aspek pengelolaan desa wisata, seperti pengembangan fasilitas, pengelolaan lingkungan, serta strategi peningkatan kunjungan wisatawan. Melalui kegiatan koordinasi tersebut, setiap stakeholder memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun masukan yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam pengelolaan desa wisata dapat mencerminkan kepentingan bersama serta memperkuat hubungan antar pihak yang terlibat.(Yunita Nugroho & Zarkasyi Rahman, 2020)

Selain koordinasi, bentuk kerja sama antar stakeholder juga terlihat melalui adanya kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata. Kolaborasi tersebut dapat berupa kerja sama dalam pengelolaan fasilitas wisata, kegiatan promosi destinasi, maupun penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Pemerintah desa bersama

pengelola wisata berperan dalam mengatur dan mengembangkan kawasan wisata agar tetap terjaga kebersihan serta kelestarian lingkungannya. Sementara itu, masyarakat lokal turut berkontribusi dengan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti penyediaan makanan, jasa parkir, maupun penyewaan perlengkapan wisata. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan merupakan hasil kerja sama dari berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan kawasan wisata. (Bachtiar et al., 2022)

Pembagian tugas antar pihak juga menjadi bagian penting dalam pola kerja sama yang terbentuk dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Pemerintah desa memiliki peran dalam mengatur kebijakan serta memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan pengelolaan desa wisata. Pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata di lapangan, termasuk pengelolaan fasilitas, pelayanan kepada pengunjung, serta menjaga ketertiban di kawasan wisata. Masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata, seperti membuka usaha kecil maupun menyediakan layanan bagi wisatawan. Di sisi lain, pelaku usaha lokal turut mendukung pengembangan pariwisata melalui penyediaan berbagai produk dan jasa yang dapat menunjang kebutuhan pengunjung. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya sistem kerja yang saling melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya. (Bonaventura Daputra Agam, 2024)

Hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya pada umumnya terjalin dalam bentuk hubungan yang bersifat saling mendukung. Pemerintah desa berperan dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan kegiatan pariwisata sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Masyarakat lokal sebagai bagian dari komunitas desa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan. Sementara itu, pelaku usaha lokal berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Hubungan yang terjalin antara ketiga pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya berorientasi pada pengembangan destinasi wisata semata, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pola kerja sama yang terbangun secara baik, pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. (Made et al., 2024)

Pengelolaan desa wisata pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, pengelolaan kawasan wisata menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan kerja sama antar stakeholder, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan pendanaan, serta upaya promosi wisata. Tantangan-tantangan tersebut perlu diperhatikan secara serius

karena dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan desa wisata serta tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. (Lewaherilla et al., 2022)

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan desa wisata adalah keterbatasan dalam membangun kerja sama yang optimal antara berbagai stakeholder yang terlibat. Meskipun pengelolaan desa wisata melibatkan pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, serta pelaku usaha, koordinasi antar pihak tersebut tidak selalu berjalan secara maksimal. Perbedaan kepentingan maupun keterbatasan komunikasi antar stakeholder dapat menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pengembangan wisata. Dalam beberapa situasi, kurangnya keterlibatan aktif dari sebagian pihak juga dapat memengaruhi efektivitas kerja sama yang terjalin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar setiap stakeholder dapat berperan secara optimal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. (Fitriyanti, 2022)

Selain kendala dalam kerja sama antar stakeholder, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Fasilitas pendukung seperti akses jalan menuju kawasan wisata, area parkir, tempat istirahat, maupun sarana kebersihan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan. Apabila fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai, maka hal ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Infrastruktur yang kurang memadai juga dapat menyulitkan pengelola dalam mengembangkan berbagai kegiatan wisata yang lebih beragam. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas dan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. (Marliani, 2023)

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata berkaitan dengan keterbatasan pendanaan. Pengembangan kawasan wisata pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pembangunan fasilitas, perawatan lingkungan, serta pengembangan berbagai program kegiatan wisata. Dalam banyak kasus, pengelola desa wisata masih bergantung pada sumber pendanaan yang terbatas, seperti dana desa atau kontribusi dari masyarakat setempat. Keterbatasan anggaran tersebut dapat menghambat proses pengembangan destinasi wisata, terutama dalam hal peningkatan fasilitas maupun penyelenggaraan kegiatan yang dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah maupun investor yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sektor pariwisata. (Mierdhani & Dewi, 2023)

Selain keterbatasan fasilitas dan pendanaan, promosi wisata juga menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Upaya promosi yang belum dilakukan secara optimal dapat menyebabkan potensi wisata yang dimiliki oleh kawasan tersebut belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Kurangnya pemanfaatan media promosi, baik melalui media sosial maupun kerja sama dengan pihak lain di sektor pariwisata, dapat memengaruhi

tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut. Padahal, promosi yang efektif memiliki peran penting dalam memperkenalkan potensi wisata kepada masyarakat luas serta meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Oleh karena itu, pengelola desa wisata perlu mengembangkan strategi promosi yang lebih kreatif dan terencana agar keberadaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya dapat dikenal oleh lebih banyak wisatawan. (Rizani & Sabila, 2024)

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang terencana serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya upaya untuk memperkuat kerja sama antar stakeholder, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, memperluas sumber pendanaan, serta mengoptimalkan kegiatan promosi wisata, pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya diharapkan dapat berkembang secara lebih baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (Rizky Fadilla Lubis, 2023)

Manajemen stakeholder merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama pada pengembangan desa wisata yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, manajemen stakeholder dapat dilihat dari bagaimana hubungan, koordinasi, serta kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pengelolaan desa wisata, dapat diketahui bahwa keterlibatan berbagai stakeholder seperti pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pihak pendukung lainnya telah memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan wisata. Keberadaan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai unsur yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan destinasi wisata. (Kamal Rabbani et al., 2022)

Dalam praktiknya, manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu indikator yang menunjukkan adanya pengelolaan stakeholder yang cukup baik adalah adanya keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pengelolaan kawasan wisata. Pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan kebijakan serta dukungan administratif terhadap pengembangan desa wisata. Sementara itu, pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata di lapangan, termasuk pengaturan fasilitas, pelayanan kepada pengunjung, serta menjaga kondisi lingkungan wisata. Di sisi lain, masyarakat lokal juga terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata, seperti membuka usaha kecil maupun menyediakan berbagai layanan bagi wisatawan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata telah melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholder yang memiliki peran masing-masing. (Subhan et al., 2022)

Jika dibandingkan dengan konsep pengelolaan stakeholder dalam pengembangan pariwisata, keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena setiap stakeholder memiliki sumber daya serta kemampuan yang berbeda dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, bentuk kolaborasi tersebut terlihat melalui kerja sama antara pemerintah desa, pengelola wisata, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan wisata serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang aktivitas wisata. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar hubungan antar stakeholder dapat berjalan lebih terkoordinasi dan mampu menghasilkan pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal. (Rahmadika et al., 2022)

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen stakeholder. Dalam pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang dapat mendukung keberlanjutan destinasi wisata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup aktif, pengelolaan desa wisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas setempat. (Hasra, 2024)

Selain peran masyarakat, keterlibatan pemerintah juga memiliki pengaruh penting dalam pengelolaan desa wisata. Pemerintah desa berperan sebagai pihak yang mengatur kebijakan serta memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, program pengembangan, maupun penyediaan fasilitas dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya, pemerintah desa telah menunjukkan peran yang cukup aktif dalam mendukung pengembangan kawasan wisata, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi antar stakeholder serta meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata. (Suwandana & Utami, 2022)

Secara keseluruhan, manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pengelola wisata, serta pelaku usaha telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan wisata tersebut. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat kerja sama antar stakeholder, serta mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih terencana agar pengelolaan desa wisata dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya manajemen stakeholder yang lebih

terstruktur, potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Danau Biru Palem Raya diharapkan dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (Tamrin & Rifti, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Stakeholder utama yang terlibat meliputi pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan, sementara stakeholder pendukung terdiri dari pemerintah daerah dan investor yang memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, fasilitas, maupun potensi pendanaan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama yang terkoordinasi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan kawasan wisata. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya telah berjalan cukup baik, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan wisata serta dukungan pemerintah desa dalam pengaturan dan pengembangan destinasi wisata. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat menunjukkan adanya upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata serta meningkatkan daya tarik destinasi bagi wisatawan. Keberadaan pelaku usaha lokal juga turut memberikan kontribusi dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung aktivitas wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung, keterbatasan pendanaan untuk pengembangan kawasan wisata, serta upaya promosi yang belum dilakukan secara optimal. Selain itu, koordinasi antar stakeholder masih perlu ditingkatkan agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat manajemen stakeholder melalui peningkatan koordinasi, pengembangan fasilitas pendukung wisata, serta penguatan strategi promosi yang lebih luas agar potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Danau Biru Palem Raya dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya pengelolaan yang melibatkan berbagai stakeholder secara aktif dan terkoordinasi, pengembangan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Selain itu, pengelolaan yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat posisi desa wisata sebagai salah satu potensi pariwisata yang dapat mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah Dina Fatin. (2024). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 28.
- Annisa Lazuardina. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Panundaa Ciwidey Kabupaten Bandung. *Open Journal Systems*, 18(5), 1211.
- Anwar, A., Diswandi, D., & Wijimulawiani, B. S. (2025). Analisa Sustainablitas Pariwisata Di Danau Biru, Desa Karang Sidemen. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 189-211. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.206>
- Anwar Thalib, M., Studi Akutansi Syariah, P., Sultan Amal Gorontalo, I., & Sultan Amay, J. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1). <http://seandanan.fisip.unila.ac.id/index.php/seandanan/>
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process Dalam Pengelolaan Desa Wisata Collaborative Process In The Management Of Tourist Village. *Jurnal Administrasi Negara*, 28, 340.
- Bonaventura Daputra Agam. (2024). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Lodok, Desa Poco Rutang, Kabupaten Manggarai Barat. *Journal Of Tourism And Hospitality Analysis*, 11.
- Fitriyanti, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, 2(1), 43.
- Hasra. (2024). Kepemimpinan Profesionalisme Kepala Sekolah Berbasis Servant Leadership Dalam Perkembangan Manajemen Mutu Pendidikan. *Journal Of Education Research*, 5(3), 4168.
- Iswanto, D., & Puspitasari, H. (2024). Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Pulau Derawan (Stakeholder Analysis In Sustainable Tourism Development On Derawan Island). *Semesta*, 25.
- Kamal Rabbani, M., Abimanyu, A., Furqon, A. Z., & Yaqin, M. A. (2022). Manajemen Stakeholder Pada Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (Snp) Menggunakan Project Management Body Of Knowledge (Pmbok) Stakeholder Management In Schools Based On National Education Standards (Snp) Using The Project Management Body Of Knowledge (Pmbok). *Jacis : Journal Automation Computer Information System*, 2(02), 116-124.
- Lewaherilla, N. C., Pentury, G. M., Sijabat, A., & Ekonomi, F. (2022). Pengembangan Kemampuan Manajerial Dan Profesionalisme Dalam Pengelolaan Usaha Kecil Di Desa Wisata Sawai Kabupaten Maluku Tengah. *Communnity Development Journal*, 3(2), 584-588.
- Made Ersani, N., Nyoman, I., Arida, S., Gede, I., & Sastrawan, A. (2025). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Air Terjun Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 13, 201.

- Made, N., Suwantara Putri, A., Purnamaningsih, P. E., Ni, R., & Supriliyani, W. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan English Title: Collaborative Governance In The Development Of Pinge Tourism Village, Marga District, Tabanan Regency. *Business And Investment Review (Birev)*, 2(1), 2986–7347. [Https://Lgdpublishing.Org/Index.Php/Birev](https://Lgdpublishing.Org/Index.Php/Birev)
- Marliani. (2023). Peran Pemerintah Dalam Manajemen Strategi Pengelolaan Desa Wisata Di Daerah Kepulauan (The Role Of Government In Management Of Tourism Village Management Strategies In Archipelago). *Jurnal Archipelago*, 02(2), 133–146.
- Mierdhani, I. R., & Dewi, L. (2023). Problematika Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kampung Adat Prai Ijing Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6, 288.
- Muntiyas, H. A., Mafruhah, I., & Tantra, I. G. L. P. (2024). Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Sangiran. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 23(1), 1–12. [Https://Doi.Org/10.22225/We.23.1.2024.1-12](https://Doi.Org/10.22225/We.23.1.2024.1-12)
- Purboyo, H., Putro, H., & Briliyanti, A. (2020). The Effectivity Of Stakeholders' Collaboration On Tourism Destination Governance In Pangandaran, West Java, Indonesia. *Printed In Indonesia. All Right Reserved. Published By Itb Journal Publisher*, 17(1), 25–37. [Https://Doi.Org/10.5614/Ajht.2019.17.1.03](https://Doi.Org/10.5614/Ajht.2019.17.1.03)
- Putri, Mita A., & Maryani. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Dermaga Tepian Mahligai Di Desa Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar. *Jurnal Nawasena*, 2(1), 22.
- Rahmadika, H., Muhd, &, & Riauan, A. I. (2022). Manajemen Corporate Social Responsibility Grapari Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Journal Of Communication Management And Organization Juni*, 2022(1), 1–13.
- Ramadina, R., Eka Safitri, A., Herliasyah, D., Damayanti, E., Asyifa, N., Maharani, P., Kurbiyanto, A., Sarah, S., & Altiarika, E. (2023). Pemberdayaan Branding Kwt Dan Potensi Wisata Danau Kaolin Melalui Integrasi Digital Menuju Bisnis Lokal Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 37–47. [Https://Ojssemmas-Kknmas.Unmuhbabel.Ac.Id](https://Ojssemmas-Kknmas.Unmuhbabel.Ac.Id)
- Rizani, D. F., & Sabila, S. V. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Pengembangan Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 138–152. [Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.12511744](https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.12511744)
- Rizky Fadilla Lubis. (2023). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Ournal Economic And Strategy (Jes)*, 4(2), 108–118.
- Semara, Sang Made Dwipa. (2024). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Paksewali Di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 783–790.

- Subhan, M., Meiwanda, G., & Arya Putri, R. (2022). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Siak Hijau Di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350216>
- Suherlan, H., Adriani, Y., Pah, D., Fauziyyah, I., Evangelin, B., Wibowo, L., Hanafi, M., & Rahmatika, C. (2022). Keterlibatan Masyarakat Dalam Mendukung Program Desa Wisata. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(1), 99–111. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>
- Suwandana, A. V., & Utami, A. W. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Website Menggunakan Project Management Body Of Knowledge 6 (Studi Kasus Pt. Tekno Mandala Kreatif). *Jeisbi*, 03, 2022.
- Syaeful Millah, A., Arobiah, D., Selvia Febriani, E., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140.
- Tamrin, M. H., & Rifti, L. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Bumdes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 167–177. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3598>
- Tohir, R., Purnamasari, H., Aditya, I., & Pemerintahan, P. I. (2023). Peran Pemerintah Desa : Pengembangan Umkm Di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 293–310.
- Yunita Nugroho, A., & Zarkasyi Rahman, A. (2020). *Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*. 1(1), 15.